

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan dinamika bisnis global mendorong perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada kemampuan mempertahankan kinerja keuangan yang stabil di tengah berbagai tekanan internal dan eksternal. Kinerja keuangan menjadi aspek penting karena mencerminkan sejauh mana perusahaan mampu mengelola sumber daya secara efektif dan efisien dalam menghasilkan keuntungan. Kinerja ini tercermin dalam laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai kondisi keuangan serta hasil operasional perusahaan dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar dalam memprediksi prospek perusahaan di masa mendatang (Hutabarat, 2020). Salah satu indikator yang umum digunakan adalah *Return on Assets* (ROA), yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki (Nugroho & Hersugondo, 2022). Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya untuk menghasilkan keuntungan. Namun demikian, pengukuran kinerja keuangan yang hanya berfokus pada aspek *financial* dinilai belum mampu menggambarkan keseluruhan nilai perusahaan terutama dalam menghadapi tuntutan keberlanjutan yang semakin kompleks.

Seiring dengan perkembangan bisnis global, terjadi pergeseran dalam penilaian kinerja perusahaan, di mana investor tidak lagi hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga mempertimbangkan faktor non-keuangan yang berkaitan dengan keberlanjutan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya perhatian terhadap

aspek *environmental, social, and governance* (ESG), yang tidak hanya dipandang sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan, tetapi juga sebagai indikator risiko dan peluang jangka panjang yang dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Peningkatan perhatian terhadap ESG tidak terlepas dari berbagai isu global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan lemahnya praktik tata kelola perusahaan. Aktivitas industri yang intensif dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali telah berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca (Pasaribu et al., 2025). Kondisi ini mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis yang lebih berkelanjutan guna meminimalkan dampak negatif sekaligus menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang.

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi agenda 2030 tentang pembangunan berkelanjutan yang mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan (United Nations). Agenda tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah, tetapi juga memberikan dorongan bagi sektor bisnis untuk berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Pemerintah Pusat, 2022), yang menegaskan bahwa perusahaan sebagai pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab dalam mendukung keberlanjutan melalui praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab.

Meskipun demikian, aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan masih menunjukkan kontribusi signifikan terhadap kerusakan lingkungan global. Studi yang dilakukan oleh tim peneliti dari Dartmouth College menemukan bahwa sekitar 111 perusahaan besar diperkirakan menyebabkan kerugian iklim hingga mencapai \$28 triliun, dengan lebih dari setengah kerugian tersebut berasal dari 10 perusahaan utama di sektor energi (Borenstein, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa sektor energi memiliki tingkat risiko keberlanjutan yang tinggi sekaligus peran besar dalam memengaruhi kondisi lingkungan global.

Pada konteks ini, setiap sektor industri di Indonesia memiliki tingkat eksposur yang berbeda terhadap risiko keberlanjutan. Sektor energi menjadi salah satu sektor dengan tingkat eksposur tertinggi, yang tercermin dari kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca. Pada tahun 2021, sektor energi menghasilkan emisi sebesar 595.862,49 Gg CO₂e dan menjadi kontributor terbesar dibandingkan sektor lainnya. Selanjutnya, pada tahun 2022, emisi sektor energi meningkat menjadi 727.330,26 Gg CO₂e dan tetap mempertahankan posisinya sebagai penyumbang emisi tertinggi, kemudian pada tahun 2023, emisi sektor energi kembali mengalami peningkatan menjadi 752.279,84 Gg CO₂e, sehingga semakin menegaskan dominasi sektor ini dalam struktur emisi nasional (Badan Pusat Statistik, 2025). Jika dibandingkan dengan sektor lain seperti kehutanan, pertanian, maupun limbah, sektor energi tidak hanya memiliki nilai emisi yang paling besar, tetapi juga menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil, yang mengindikasikan bahwa tekanan lingkungan dari sektor ini bersifat struktural dan berkelanjutan.

Kinerja keuangan dan operasional sektor energi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), produksi minyak mentah dan kondensat nasional tercatat mengalami penurunan secara berkelanjutan selama periode 2021-2024. Produksi tercatat sebesar 240.342,5 ribu barel pada tahun 2021, kemudian turun menjadi 223.532,5 ribu barel pada tahun 2022, lalu 221.088,9 ribu barel pada tahun 2023, dan semakin berkurang menjadi 211.756,2 ribu barel pada tahun 2024. Meskipun volume produksi mengalami penurunan, pendapatan bruto perusahaan pertambangan dan gas bumi menunjukkan fluktuasi. Pendapatan bruto tercatat sebesar Rp458,89 triliun pada tahun 2021, meningkat signifikan menjadi Rp551,61 triliun pada tahun 2022, kemudian turun menjadi Rp497,66 triliun pada tahun 2023, kembali naik menjadi Rp504,21 triliun pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan kemampuan adaptasi perusahaan terhadap dinamika harga energi global meskipun volume produksi terus mengalami penurunan. Dilihat dari biaya operasional penambangan tercatat sebesar Rp21,16 triliun pada tahun 2021, menurun menjadi Rp20,39 triliun pada tahun 2022, dan kembali turun menjadi Rp17,93 triliun pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 biaya operasional melonjak signifikan menjadi Rp25,45 triliun, mengindikasikan meningkatnya beban yang harus ditanggung perusahaan seiring semakin kompleksnya aktivitas pertambangan. Sementara itu, jumlah tenaga kerja di sektor ini juga terus menurun, dari 19.501 orang pada tahun 2021 menjadi 18.050 orang pada tahun 2024. Kondisi ini menggambarkan kompleksitas tantangan yang dihadapi sektor energi dalam mempertahankan kinerja keuangan di tengah tekanan

efisiensi operasional sekaligus tuntutan tanggung jawab lingkungan dan sosial yang semakin besar.

Berdasarkan dampak lingkungan dan kompleksitas operasional sektor energi tersebut mendorong semakin kuatnya tuntutan dari berbagai pemangku kepentingan agar perusahaan-perusahaan di sektor ini menerapkan dan mengungkapkan praktik ESG secara lebih transparan. Pengungkapan ESG yang mencakup aspek *environmental, social, and governance* dipandang sebagai sarana bagi perusahaan untuk menunjukkan akuntabilitas dan komitmen terhadap keberlanjutan, sekaligus mekanisme untuk membangun kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Tuntutan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga telah tercermin dalam kasus nyata yang dialami oleh perusahaan energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Kasus yang melibatkan PT Bukit Asam Tbk (PTBA), salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia. Di balik kinerjanya sebagai perusahaan plat merah, PTBA pernah tersandung kasus pencemaran lingkungan dan menerima sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2021. PTBA dikenai sanksi administrasi paksaan langsung dari KLHK yang melakukan investigasi berdasarkan temuan dan laporan masyarakat, karena aktivitas perusahaan dianggap telah mencemari Sungai Kiahaan, Tanjung Enim pada 7 Juni 2021. Setelah dilakukan verifikasi dan perusahaan dinyatakan telah memenuhi kewajiban pemenuhan sanksi, menteri KLHK mencabut sanksi tersebut pada 14 Desember 2021 (Rmolsumsel, 2022). Pada tahun yang sama, permasalahan lingkungan PTBA tidak berhenti disitu, melalui anak usahanya, PLTU di Tanjung

Enim, Kabupaten Muara Enim, turut mendapatkan PROPER Merah dari KLHK berdasarkan SK No.,1307/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2021 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2021 yang ditandatangani Menteri Siti Nurbaya (Rmolsumsel, 2022). Kondisi ini merupakan gambaran nyata bagaimana lemahnya kinerja lingkungan dapat berujung pada sanksi regulator yang tidak hanya merusak reputasi perusahaan, tetapi juga berpotensi menambah beban biaya kepatuhan dan hukum yang memengaruhi kinerja keuangan.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa dampak lingkungan dan sosial tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga berpotensi memengaruhi kinerja keuangan perusahaan secara langsung. Dampak tersebut dapat muncul dalam bentuk peningkatan biaya operasional, risiko hukum, kerusakan reputasi, serta penurunan kepercayaan investor. Penerapan dan ESG *disclosure* menjadi mekanisme penting bagi perusahaan dalam mengelola risiko sekaligus menjaga keberlanjutan kinerja jangka panjang. Hal ini diperkuat dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Regulasi ini mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan sebagai bentuk transparansi. Melalui regulasi tersebut, perusahaan didorong untuk mengungkapkan informasi terkait dampak *environmental, social, and governance* sebagai bagian dari akuntabilitas kepada *stakeholder*. Selain itu, perusahaan juga mulai menyesuaikan praktik ESG *disclosure* dengan standar

internasional, seperti GRI *Standards* 2021, yang menyediakan indikator yang lebih sistematis.

Pandangan tersebut tercermin dalam penelitian terdahulu mengenai pengaruh *environmental, social, and governance disclosure* dan kinerja keuangan perusahaan masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa pengungkapan ESG justru berdampak negatif terhadap kinerja keuangan, karena implementasi ESG dapat meningkatkan biaya operasional serta mengalihkan fokus perusahaan dari jangka pendek (Thi Nguyen, 2026 dan Aryati & Susilawati, 2025). Namun, di sisi lain, terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa ESG memiliki pengaruh positif, terutama dalam meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan (Gholami et al., 2022). Selain itu, studi lain juga menunjukkan bahwa pengaruh ESG tidak bersifat seragam, di mana masing-masing aspek (*Environmental, Social, and Governance*) dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap kinerja keuangan perusahaan (Gutiérrez-Ponce & Wibowo, 2023).

Ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh *environmental, social, and governance disclosure* terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan indikator profitabilitas, khususnya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih jelas, serta memperkaya literatur terkait pelaporan keberlanjutan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *environmental disclosure* memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?
2. Apakah *social disclosure* memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?
3. Apakah *governance disclosure* memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *environmental, social, and governance disclosure* terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan indikator profitabilitas pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2021-2025.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang keuangan dan keberlanjutan, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara ESG *disclosure* dan kinerja keuangan perusahaan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas pengungkapan ESG serta mendukung penerapan

strategi keberlanjutan yang berorientasi pada peningkatan kinerja keuangan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi serta menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dalam meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan di pasar modal Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan berkaitan dengan penelitian ini, konsep variabel independen, dependen, dan variabel kontrol, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini berisi jenis, objek, populasi dan sampel, operasionalisasi variabel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil pengujian sampel, pembahasan hipotesis, dan argumen mengenai hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran berdasarkan penelitian.